

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 141 Telp. (0283) – 671031 – 671032 Fax. 672323
Brebes - 52212

KEPUTUSAN SEKRETAS DAERAH KABUPATEN BREBES SELAKU ATASAN PPID KABUPATEN BREBES

NOMOR 551/1385TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Uji Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. Bahwa Informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan In tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
 7. Peraturan Komisi INformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- KEDUA : Batas pengecualian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal, 26 April 2022
SEKRETARIS DAERAH



Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madyaa
NIP. 19650903 198903 1 010

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENCECUALIAN	KONSEKUENSI	
					Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi Ditutup
1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Hasil Uji Laboratorium dan Penilaian tentang Register Pangan Segar Asal Tumbuhan	-UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Sampai dengan ada keputusan resmi 14 hari	- penyalahgunaan dokumen - terjadinya gratifikasi - maka akan mengganggu jalannya proses penilaian dan hasil uji lab.	penilaian dan uji lab. akan berjalan sesuai jadwal proses sebenarnya.
2	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PROSES REKRUITMEN SISWA PPLP	UU NOMOR 3 TAHUN 2005 PASAL 21	Terbatas sampai pengumuman Hasil Seleksi PPLP bulan Februari s.d April 2022	Menarik calon atlet baru untuk mengikuti PPLP agar nantinya lolos PPLP bisa membawa nama Daerah/Kabupaten sebagai atlet yang berprestasi	Mengurangi banyaknya calon atlet yang mendaftar PPLP
		PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA (PPAN)	UU NOMOR 40 TAHUN 2009 PASAL 27 AYAT (3)	Terbatas sampai pelaksanaan kegiatan PPAN (Asean-Korea Economic Forum 2022) April s.d 27 Juni 2022	menarik minat Pemuda kabupaten Brebes untuk mengikuti kegiatan PPAN	Mengurangi Pemuda Kabupaten Brebes untuk seleksi kegiatan PPAN (Asean -Korea Economic Forum 2022)
		SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN PEDESAAN (SP3)		Terbatas sampai habis kontrak program SP3 pendafaran dimulai pada Januari dan diteruskan sampai bulan September 2022	Desa penempatan SP3 akan terbantu pembangunannya serta menarik minat Pemuda untuk berlayar dari desa	Tidak tercapainya potensi desa yang terganggu di kabupaten Brebes
		PEMILIHAN PASKIBRAKA	PASAL 17 UU NO.14 TAHUN 2008 HURUF I DAN J	Terbatas ditetapkan Paskibraka Kabupaten Brebes tahun 2022. Seleksi dimulai pada Maret dan menjalankan tugas pada 1-17 Agustus 2022	Menarik siswa/swi SMA/SMK/MA Kabupaten Brebes untuk mendaftar Calon PASKIBRAKA Kabupaten Brebes tahun 2022	Bakat Miniat Calon PASKIBRAKA Kabupaten Brebes Tidak akan Terbuka dalam seleksi penjurangan PASKIBRAKA Kab. Brebes
3	DINAS SOSIAL	Data anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik itu pelaku maupun korban	UU No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak	Ditetapkan paling lama 30 tahun	tidak menimbulkan bullying terhadap anak	menjaga identitas dan prinsip anak yang bersangkutan
		Data eks NAPZA dan korban yang sedang menjalani rehabilitasi	UU No.35 Tahun 2009	Ditetapkan paling lama 30 tahun	Dapat menimbulkan kesenjangan sosial dilingkungan masyarakat dan memunculkan stigma negatif di masyarakat	Melindungi hak pribadi korban dan menjaga agar korban selanjutnya dapat hidup normal sedialkila
		Data PSK terjerang oleh Sarpol PP (nama, alamat, NIK, kasus, dll)	UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban	Ditetapkan paling lama 30 tahun	Dapat menimbulkan trauma/ stigma bagi masyarakat dan pelaku	Melindungi hak pribadi korban perilaku dan menjaga agar korban perilaku selanjutnya dapat hidup normal sedialkila
		Data ODHA (Orang Dengan HIV/ AIDS)	UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi ODHA	Ditetapkan paling lama 30 tahun	Dapat menimbulkan trauma/ stigma bagi masyarakat dan pelaku	Melindungi hak pribadi korban perilaku dan menjaga agar korban perilaku selanjutnya dapat hidup normal sedialkila
4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Usulan Penetapan Upah Minimum Bupati/Walikota	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j	sampai upah minimum ditetapkan gubernur 2 bulan (akhir bulan November) usulan dari Bupati ke Gubernur keluar, surat jawaban dari gubernur awal bulan (2 minggu) selanjutnya membuat surat edaran Bupati Brebes tersebut berlaku 1 tahun	1. adanya ketidaksesuaian apa yang diharapkan oleh buruh pabrik 2. tidak disalahgunakan oleh orang yang berkepentingan dan tidak bertanggungjawab	1. mengganggu proses kesepakatan penentuan UMK 2. aman dalam menentukan UMK tidak diaksas oleh publik/ oknum yang tidak berhak
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Data Identitas Korban Tanah Longsor	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai relokasi jadi dan dapat ditempati membutuhkan waktu 1 tahun	Mengungkap rahasia korban pribadi	Melindungi hak pribadi korban

6	SEKRETARIAT DPRD	Catatan -catatan, Notulen, Risalah Rapat yang dinyatakan tertutup	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j,	Sampai dengan catatan-catatan, Notulen, Risalah Rapat yang dinyatakan tertutup bisa dibuka dan menghasilkan keputusan batas waktu pengecualian 1 (satu) tahun	terjadi kegaduhan akan mengganggu jalannya rapat	kondusif sehingga hasil rapat akan representatif
		Keputusan alat-alat kelengkapan DPRD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	- UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 37D	sampai dengan diterapkannya Keputusan alat-alat kelengkapan DPRD di mulai dengan rapat paripurna Keputusan alat-alat kelengkapan DPRD batas waktu pengecualian 1 (satu) tahun	terjadi kegaduhan akan ada faktor luar yang mempengaruhi keputusan alat kelengkapan DPRD	keputusan alat kelengkapan DPRD tanpa tekanan
		Proses Penerapan Keputusan Gubernur Jateng tentang Peremian Pemberhentian dan Peremian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/ Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota	- Pasal 17 UUU No. 14 Tahun 2008 Huruf i dan j - Pasal 17 UUU No. 14 Tahun 2008 Huruf i	Tertbatas, sampai dengan diterapkannya Keputusan Gubernur Jateng tentang Peremian Pemberhentian dan Peremian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/ Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota dan diumumkan melalui paripurna pelantikan PAW batas waktu pengecualian 1 (satu) tahun	terjadi tekanan yang menghalangi calon anggota DPRD dan menghalangi proses pelantikan	suasana kondusif sehingga pelantikan berjalan lancar
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	Hasil Uji Laboratorium Lingkungan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tertbatas, dengan persetujuan si pengguna	Informasi tersebut merupakan Informasi kualitas lingkungan pada suatu lokasi (yang menjadi tanggungjawab konsumen), sehingga apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan.	menjaga kerahasiaan Informasi sesuai SNI ISO/ IEC 17025:2017 tentang kerahasiaan.

**NOTULENSI RAPAT UJI KONSEKUENSI PUBLIK DIK
KABUPATEN BREBES TAHUN 2022**

Hari & tanggal : Selasa, 26 April 2022

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai

Pimpinan Rapat Peserta : Kepala Dinkominfotik Kabupaten Brebes

Tempat : Operation Room Dinkominfotik Kabupaten Brebes

Peserta Rapat : 1. Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Brebes
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes
4. Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes
7. Kepala DLHPS Kabupaten Brebes

Hasil Pembahasan

Uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di PPID Utama Kabupaten Brebes yang dilaksanakan pada :

Hari : Selasa, 26 April 2022

Waktu : 09.00 WIB – 11.30 WIB

Tempat : Operation Room Dinkominfotik Kabupaten Brebes

Pembahasan : dalam rangka menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan Kabupaten Brebes Tahun 2022 perlu dilaksanakan Uji Konsekuensi atas usulan daftar informasi yang dikecualikan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Uji Konsekuensi dilakukan untuk menentukan layak tidaknya, dan alasan apakah yang bisa diterima untuk menentukan suatu informasi bisa dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Saran dan Masukan :

1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Menyatakan bahwa dasar hukum diluar Undang-undang adalah PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan wajib.

2. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Menyatakan bahwa dasar hukum diluar Undang-undang adalah UMK TA 2022 dengan memakai SE Bupati No. S/ 3165/ 360/XII tanggal 15 Desember 2021 TA 2021 bulan Desember PP NO 36 TA 2021 tentang UMK, Struktur skala upah dan skala bagi perusahaan di Kab Brebes TA 2022

3. SEKRETARIAT DPRD

Menyatakan bahwa dasar hukum diluar Undang-undang adalah

- a. Peraturan Ketua DPRD Kab Brebes Nomer 1 Tahun 2019, Pasal 68 Peraturan Tatib DPRD.
- b. PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 69

4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH

Menyatakan bahwa dasar hukum diluar Undang-undang adalah Permen LHK RI Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan

Kesimpulan : hasil Uji Konsekuensi akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes selaku atasan PPID Utama.

Notulis

Rya Rizqi Amalia, S.ST.Par, MH.

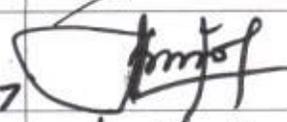
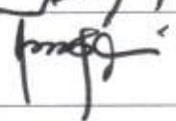
BERITA ACARA

NOMOR 55/0872/TAHUN 2022

TENTANG

HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 April 2022 telah melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	ASTRI INDAH MULYANI, SE NIP. 19820325 20101 2004	
2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	LULLY YULIAWATI, S.S., I.P.M NIP. 19750704 201001 2010	
3.	DINAS SOSIAL	HB. MARIA INDIRA Dg. S. IP NIP. 19710418 199503 2 007	
4.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Wahyu Habi Purwanto, IST NIP. 19850126 201001 1020	
5.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	Nuraini Pujiasenti, SE NIP. 19890803 201502 2 001	
6.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Heryadi, S. IP NIP. 19780909 200801 1007	
7.	SEKRETARIAT DPRD	AN IM PALAKHUDIN, P.E NIP. 19680815 199103 1 006	

Mengetahui :
PPID UTAMA KABUPATEN BREBES



LUSIANA INDIRA ISNI, S.Sos
Pembina
NIP. 19830720 200604 2 015